

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Garansi merupakan hal yang penting untuk produk elektronika seperti konsol permainan Nintendo, hal ini dikarenakan konsol permainan Nintendo pemanfaatannya berkelanjutan bisa lebih dari 1 (satu tahun). Oleh karena itu perusahaan Nintendo memberikan garansi resmi selama 12 (dua belas) bulan untuk seluruh produk konsol permainannya, hal ini juga sebagai jaminan kualitas konsol permainan yang di produksi oleh perusahaan Nintendo. Bilamana konsol permainan Nintendo mengalami kerusakan pada masa garansi maka perusahaan Nintendo akan mengganti baru atau memperbaiki konsol permainan Nintendo tersebut.

Di Indonesia sendiri garansi merupakan suatu hal yang wajib dan merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika dan Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga bila terdapat pelaku usaha yang menjual konsol permainan Nintendo tanpa memberikan garansi resmi kepada konsumen, maka konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jika pelaku usaha tersebut tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat diberikan sanksi administratif oleh badan penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat masih kurang. “Hal ini dikarenakan masih minimnya pengaduan dari konsumen akibat kerugian yang diterima, pada akhir Desember 2017 hanya 177 laporan pengaduan konsumen yang diterima Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) pada tahun tersebut.”<sup>47</sup>

“Didukung dengan pernyataan Bapak Arief Safari selaku Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN yang memberikan kuliah umum di STIKS TARAKANITA pada 19 November 2018 lalu menyampaikan, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan konsumen menyebabkan tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha di daerah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih terhitung rendah.”<sup>48</sup>

Sehingga timbulnya masalah penjualan konsol permainan Nintendo tanpa garansi resmi diakibatkan karena kurangnya pemahaman parah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat baik konsumen dan pelaku usaha terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut dapat berkerjasama dengan universitas atau sekolah, dan organisasi pengusaha di Indonesia seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Pemerintah dapat juga mengadakan seminar umum secara gratis untuk masyarakat atau dapat menyebarkan informasi mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui media sosial.

---

<sup>47</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/27/153417626/bpkn-meski-dirugikan-konsumen-indonesia-malas-mengadu> diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 15.43.

<sup>48</sup> <http://bpkn.go.id/posts/show/id/1311> diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 17.32.

Dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan peraturan tersebut juga berperan dalam memberikan dorongan bagi pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, serta menumbuhkan kemandirian bagi konsumen untuk melindungi diri apabila hak-hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha yang memperjualbelikan konsol permainan Nintendo di Indonesia sebaiknya membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan Maxsoft Pte. Ltd (perwakilan luar negeri perusahaan Nintendo untuk mendistribusikan produk Nintendo ke wilayah Indonesia) untuk mendaftarkan kartu jaminan/garansi resmi Nintendo di Indonesia dan membuat pusat layanan purna jual (*service center*) di Indonesia. Dengan begitu pelaku usaha telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadil Media, Jakarta, 2006.

Elly Erawaty, Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

### Jurnal:

Veronika Wittmann, "*World society and globalisation*", Journal for Multicultural Education (2014), vol 8.

### Halaman Internet:

<http://bpkn.go.id/posts/show/id/1311> diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 17.32.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/game-console> 29 Maret 2018 pukul 14.36

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/27/153417626/bpkn-meski-dirugikan-konsumen-indonesia-malas-mengadu> diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 15.43.

<http://metro.co.uk/2015/06/03/17-reasons-why-the-game-boy-was-the-best-games-console-ever-5225996/> 30 Maret 2018 pukul 11.23

<https://kyosgamemart.wordpress.com/2017/09/06/how-to-claim-warranty-for-your-asian-nintendo-switch-from-maxsoft/> 26 Januari 2019 pukul 19.43.

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910800> 8 April 2018 pukul 12.19

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201895360> 8 April 2018 pukul 13.38

<https://www.asus.com/zentalk/in/thread-99966-1-1.html> 12 September 2018 pukul 14.36

<http://www.businessinsider.sg/nintendo-consoles-in-history-photos-switch-2017-1/?r=US&IR=T> 29 Maret 2018 pukul 13.17

<https://www.history.com/topics/history-of-video-games> 29 Maret 2018 pukul 11.24

<http://www.maxsoftonline.com/> 8 April 2018 pukul 12.51

<http://www.maxsoftonline.com/customer-service/product-information.html>  
26 Januari 2019 pukul 21.16

[https://www.nintendo.com/consumer/retail/retail\\_retailers.jsp](https://www.nintendo.com/consumer/retail/retail_retailers.jsp) 7 April 2018 16.21

<https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html#1889> 5 September 2018 pukul 16.43

<https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/116137/bermacam-macam-garansi> 12 September 2018 pukul 15.13

<https://www.upcounsel.com/warranty-vs-guarantee> 14 November 2018 pukul 15.32

Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Undang Undang R.I., No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 42.